

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN MEMBANGUN DAN MENUMBUHKAN KARAKTER ANTI KORUPSI MENURUT KITAB BILANGAN

Andar Gunawan Pasaribu¹ Elvan Nababan² Yosef Situmorang³

Feronica Tinambunan⁴

Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen

¹Institus Agama Kristen Negeri Tarutung,

andargunawanpasaribu@gmail.com

²Institus Agama Kristen Negeri Tarutung, elvannababan20@gmail.com

³Institus Agama Kristen Negeri Tarutung, yosefasitumorang2004@gmail.com

⁴Institus Agama Kristen Negeri Tarutung, feronicateinambunan@gmail.com

Abstract

Corruption is one of the serious problems that damages the foundations of national and state life. Anti-corruption character education is one of the important strategies in forming a generation with integrity. This study aims to examine how anti-corruption values can be instilled through a scripture-based educational approach, especially in the book of Numbers in the Bible. The method used is a literature study with a qualitative-theological approach, analyzing the narratives and moral messages contained in the stories of the book of Numbers such as Korah's rebellion, the disobedience of the Israelites, and the leadership of Moses. The results of the study show that the book of Numbers contains important principles in building anti-corruption character, such as honesty, responsibility, exemplary leadership, and the consequences of moral deviation. The implementation of these values in the education system can strengthen the integrity of students and instill awareness of the dangers of corruption from an early age. This study recommends the integration of scripture values in the character education curriculum to form a clean and just society.

Keywords : Education that instills and fosters anti-corruption character, the book of numbers.

Abstrak

Korupsi merupakan salah satu permasalahan serius yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan karakter anti korupsi menjadi salah satu strategi penting dalam membentuk generasi yang berintegritas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana nilai-nilai anti korupsi dapat ditanamkan melalui pendekatan pendidikan berbasis kitab suci, khususnya dalam kitab Bilangan (Numbers) dalam Alkitab. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan kualitatif-teologis, menganalisis narasi dan pesan moral yang terkandung dalam kisah-kisah kitab Bilangan seperti pemberontakan Korah, ketidaktaatan umat Israel, dan kepemimpinan Musa. Hasil kajian menunjukkan bahwa kitab Bilangan mengandung prinsip-prinsip penting dalam membangun karakter anti korupsi, seperti kejujuran, tanggung jawab, keteladanan pemimpin, dan konsekuensi dari penyimpangan moral. Implementasi nilai-nilai tersebut dalam sistem pendidikan dapat memperkuat integritas peserta

didik serta menanamkan kesadaran akan bahaya korupsi sejak dini. Penelitian ini merekomendasikan integrasi nilai-nilai kitab suci dalam kurikulum pendidikan karakter untuk membentuk masyarakat yang bersih dan berkeadilan.

Kata kunci : Pendidikan yang menanamkan dan menumbuhkan, karakter anti korupsi, kitab bilangan.

PENDAHULUAN

Korah, seorang Lewi, bersama Datan dan Abiram dari suku Ruben, memimpin pemberontakan terhadap otoritas Musa dan Harun. Mereka menuduh Musa mengangkat dirinya sendiri sebagai pemimpin atas umat Israel, padahal menurut mereka, seluruh umat itu kudus dan Tuhan menyertai semuanya. Mereka membawa 250 pemimpin umat untuk menantang kepemimpinan Musa dan Harun dengan mempersembahkan ukupan di hadapan Tuhan.¹

Pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram (Bilangan 16:1-35)

Sebuah pemberontakan besar seperti ini biasanya memiliki banyak lapisan dan dipicu oleh berbagai motivasi serta keluhan. Beberapa ahli tafsir berpendapat bahwa keragaman sudut pandang dalam kisah ini mencerminkan gabungan dari dokumen sumber J, E, dan P, dan bahwa narasi ini merupakan hasil penyatuan dari sejumlah insiden pemberontakan dalam sejarah bangsa Israel. Namun demikian, jika ditinjau langsung dari teksnya, terlihat bahwa pemberontakan ini memiliki dimensi religius sekaligus sipil. Korah, misalnya, berhasil mengajak sesama orang Lewi untuk mendukung tuntutan atas jabatan keimaman (ayat 9-10). Di sisi lain, Datan dan Abiram—dua orang dari suku Ruben—melawan Musa karena kecewa atas ketidakmampuannya memenuhi janji akan tanah subur dan kebun anggur di Tanah Perjanjian (ayat 14). Kemungkinan besar, kesadaran bahwa mereka harus menghabiskan hidup di padang gurun membuat pemberontakan tampak sebagai solusi yang masuk akal.²

Datan dan Abiram menolak ajakan Musa untuk datang ke Kemah Suci, dan sebagai gantinya, mereka justru menyampaikan kritik keras (ayat 12-14). Sementara itu, Korah bersama 250 tokoh dari umat—yang sebagian besar, meski tidak semuanya, berasal dari kalangan Lewi (ayat 7, 8; 27:3)—datang membawa perbaraan sebagai simbol bahwa mereka merasa layak dan suci untuk menjalankan fungsi keimaman. Ketika itu, kemuliaan Tuhan tiba-tiba menampakkan diri di pintu Kemah Suci, dan Ia menunjukkan dukungan-Nya terhadap

¹ Donald James Taylor, "A Narrative Critical Analysis Of Korah's Rebellion In Numbers 16 And 17," 2010.

Musa dengan membuka bumi untuk menelan Korah, Datan, dan Abiram bersama seluruh keluarga dan kepemilikan mereka (ayat 32).

Setelah itu, hukuman berlanjut dengan membinasakan mereka yang membawa perbaraan. Meski dilakukan oleh orang-orang jahat, perbaraan tersebut tetap dianggap kudus—karena Tuhan memiliki maksud khusus terhadap benda-benda itu. Sebagaimana dijelaskan, “Karena telah dibawa ke hadapan Tuhan oleh orang-orang itu... maka hal itu menjadi peringatan bagi bangsa Israel agar tidak ada lagi orang awam, yang bukan keturunan Harun, berani membakar ukupan di hadapan Tuhan” (ayat 37-40). Dalam peristiwa itu, Harun berdiri di antara yang mati dan yang hidup—suatu gambaran yang kuat tentang peran imam sebagai perantara. Bukan karena Harun memiliki keunggulan pribadi (16:5), tetapi semata-mata karena pemilihan Allah atas dirinya, persembahannya mampu mendamaikan umat dan menghentikan tulah itu (bandingkan dengan Ibrani 5:4-6).²

METODE PENELITIAN

Artikel ini mencoba menguraikan secara teoritis dari beberapa aspek tentang pendidikan antikorupsi dalam membentuk karakter dan humanistik mahasiswa di perguruan tinggi. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur Ajat Sudrajat, “Mengapa Pendidikan Karakter” 1, no. 1 (2011): 47–58, <https://doi.org/10.21831/jpk.v1i1.1316>. Hasil yang diperoleh berdasarkan perbandingan dari berbagai referensi buku, artikel dan media lainnya. Studi literatur yang dimaksud untuk menginformasikan kepada pembaca berdasarkan hasil penelitian dari artikel, buku dan media massa serta memiliki keterkaitan erat dengan penelitian yang dilakukan pada artikel ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PENGERTIAN KARAKTER

Istilah "korupsi" berasal dari bahasa Inggris *corruption*, yang memiliki arti "perubahan", seperti halnya dalam konteks perubahan bahasa. Namun dalam konteks sosial dan moral, kata ini juga dimaknai sebagai tindakan curang, biasanya dilakukan akibat rendahnya integritas atau akhlak seseorang, misalnya saat melakukan kecurangan dalam transaksi. Kata *corruption* itu sendiri bersumber dari kata dasar *corrupt*, yang memiliki dua arti

² Matteo Carmignola Dan Bab Rel, “Participatory Revelation,” T.T.

utama. Pertama, bermakna rusak atau busuk, biasanya digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang secara fisik atau moral telah mengalami kerusakan. Kedua, bermakna tindakan jahat, penyuapan, atau kecurangan yang ditujukan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (KBBI) , kata "korupsi" berakar dari kata "korup", yang berarti rusak, busuk, atau suka menerima sogokan yakni memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi karena kemerosotan moral. Maka, korupsi secara umum diartikan sebagai tindakan menyimpang seperti penggelapan dana, penerimaan suap, atau kecurangan dalam transaksi keuangan. Dalam konteks tulisan ini, istilah “korupsi” digunakan untuk merujuk pada perilaku menyalahgunakan kekuasaan demi keuntungan pribadi atau kelompok, seperti menerima suap, menggelapkan dana, atau memperoleh bayaran ilegal dalam transaksi.³

PENDIDIKAN KARAKTER

Pendidikan karakter adalah serangkaian usaha sistematis untuk menanamkan nilai-nilai positif agar seseorang tumbuh menjadi pribadi yang bijak, berakhlak, dan mampu memberikan dampak baik bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan Megawangi (dalam Kesuma, 2013, hlm. 5) yang menyatakan bahwa pendidikan karakter bertujuan membimbing anak-anak agar mampu membuat keputusan bijak dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari demi kemaslahatan lingkungan sosial mereka. Pengertian ini lahir dari gabungan dua konsep utama: "pendidikan" dan "karakter". Sebagai tambahan, berikut adalah sejumlah definisi pendidikan karakter menurut beberapa ahli: ⁴

- **Samani & Hariyanto (2013, hlm. 45):** Pendidikan karakter adalah proses membimbing peserta didik agar berkembang menjadi manusia utuh, yang memiliki karakter kuat dalam aspek hati, pikiran, jasmani, serta kehendak dan rasa.
- **Wibowo (2013, hlm. 40):** Pendidikan karakter adalah sarana menanamkan nilai-nilai moral pada peserta didik, agar mereka memiliki karakter luhur yang diterapkan baik di rumah, sekolah, maupun masyarakat.
- **Salahudin & Alkrienciehie (2013, hlm. 42):** Pendidikan karakter merupakan pendidikan moral atau akhlak, yang bertujuan membentuk perilaku positif dalam keseharian individu.

³ Dr Muchlas Samani, “Konsep Dan Model Pendidikan Karakter,” 2019.

⁴ Agus Wibowo, “Manajemen Pendidikan Karakter Di Sekolah,” 2017.

- **Zubaedi (2012, hlm. 19):** Pendidikan karakter mencakup segala bentuk upaya yang dilakukan oleh guru dalam membentuk dan menanamkan nilai-nilai etika secara menyeluruh pada peserta didik.
- **Muhamimin Azzet (2014, hlm. 37):** Pendidikan karakter adalah sistem yang bertujuan menanamkan nilai-nilai positif kepada seluruh elemen sekolah, agar tercipta perilaku dan pemikiran yang sesuai dengan nilai-nilai moral.
- **Ratna Megawangi (dalam Kesuma, 2013, hlm. 5):** Pendidikan karakter adalah proses membentuk anak agar mampu membuat pilihan bijak dan mengimplementasikannya dalam keseharian untuk memberi kontribusi positif pada lingkungannya.
- **Zusnani (2012, hlm. 155):** Pendidikan karakter merupakan proses pendampingan terhadap peserta didik agar menjadi manusia utuh yang memiliki nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, kepedulian, kecerdasan, kebersihan, kesehatan, dan kreativitas.⁵

PENDIDIKAN MENANAMKAN DAN MENUMBUHKAN KARAKTER

Pendidikan bukan sekadar proses transfer ilmu pengetahuan, melainkan juga sarana pembentukan karakter, nilai, dan kepribadian peserta didik. Dalam konteks ini, dua pendekatan yang sering digunakan adalah menanamkan dan menumbuhkan nilai. Kedua pendekatan ini memiliki perbedaan mendasar dalam orientasi dan metodologi, namun keduanya memiliki peran utama dalam mengembangkan individu yang baik secara akademis serta beretika dan berintegritas dalam kehidupan bermasyarakat. Menanamkan nilai dalam pendidikan berarti menyampaikan pengetahuan, sikap, atau nilai secara langsung dari pihak pendidik kepada peserta didik. Proses ini bersifat instruktif dan umumnya dilakukan secara satu arah, di mana guru atau pendidik menjadi sumber utama nilai yang harus diterima oleh peserta didik.⁶

- Pendekatan ini dilakukan melalui metode seperti:
 - Pengajaran langsung, misalnya menyampaikan definisi dan teori tentang nilai-nilai tertentu.
 - Nasihat moral, yakni memberikan arahan mengenai perilaku yang dianggap baik atau buruk.
 - Keteladanan, di mana pendidik menjadi contoh nyata dari nilai yang diajarkan.

⁵ M Ag Zubaedi, *Desain Pendidikan Karakter* (Prenada Media, 2015).

⁶ Henry Alexis Rudolf Tilaar, *Perubahan Sosial Dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif Untuk Indonesia* (Penerbit Pt. Gramedia Widiasarana Indonesia Bekerja Sama Dengan Center For ..., 2002).

- Pengawasan dan pembiasaan, seperti penerapan aturan sekolah yang mendukung perilaku positif.

Misalnya, seorang guru mengajarkan nilai kejujuran dengan meminta peserta didik menghafalkan definisi kejujuran dan menjelaskan pentingnya kejujuran dalam kehidupan. Di sini, peserta didik lebih bersifat pasif, menerima nilai yang ditanamkan tanpa banyak ruang untuk eksplorasi atau refleksi pribadi.⁷

Menurut Tilaar (2015), proses penanaman nilai ini penting sebagai fondasi awal karena memberikan arah dan batasan moral bagi peserta didik, terutama dalam usia dini ketika kapasitas kognitif dan moral masih dalam tahap berkembang. Menumbuhkan Nilai dalam Pendidikan Berbeda dengan menanamkan, pendekatan menumbuhkan menekankan pentingnya menciptakan lingkungan dan suasana belajar yang memungkinkan peserta didik membangun dan menginternalisasi nilai secara alami. Pendekatan ini bersifat partisipatif dan dua arah, di mana peserta didik tidak hanya menerima, tetapi juga mengalami dan memaknai nilai yang diajarkan. Menumbuhkan karakter dilakukan melalui:

- Pembiasaan perilaku baik, seperti membiasakan berkata jujur dalam interaksi sehari-hari.
- Pemberian ruang refleksi dan dialog, yang memungkinkan peserta didik memahami makna nilai berdasarkan pengalaman pribadi.
- Lingkungan sosial yang mendukung, seperti budaya sekolah yang mendorong kolaborasi, empati, dan tanggung jawab.

Menurut Anies Baswedan (2015), *menumbuhkan* berarti menciptakan suatu kondisi atau lingkungan yang mendorong berkembangnya budi pekerti anak secara alami, bukan dengan cara memaksakan nilai dari luar untuk ditanamkan secara langsung. Pernyataan ini menekankan bahwa pendidikan karakter yang efektif harus berfokus pada pertumbuhan nilai-nilai yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri. Dalam kerangka ini, peserta didik belajar secara aktif melalui pengalaman dan interaksi sosial sehari-hari, sehingga nilai-nilai tersebut tumbuh menjadi bagian integral dari karakter mereka, bukan sekadar hasil hafalan atau bentuk kepatuhan terhadap otoritas. Pendekatan menanamkan diperlukan pada tahap awal proses pendidikan, khususnya dalam memberikan dasar-dasar nilai dan norma yang menjadi acuan perilaku. Namun, tanpa proses menumbuhkan, nilai-nilai tersebut akan bersifat artifisial dan

⁷ Thomas Lickona, *Educating For Character: How Our Schools Can Teach Respect And Responsibility* (Bantam, 1992).

tidak terinternalisasi secara mendalam. Sebaliknya, menumbuhkan nilai tanpa dasar yang kuat juga bisa menimbulkan kebingungan normatif pada peserta didik. Oleh karena itu, pendekatan ideal dalam pendidikan karakter adalah integrasi antara keduanya: menanamkan sebagai fondasi dan menumbuhkan sebagai proses penguatan dan aktualisasi nilai dalam kehidupan nyata.⁸

Lickona (1991) menyatakan bahwa pendidikan karakter yang efektif terdiri dari tiga elemen utama, yaitu *moral knowing* (pemahaman tentang moral), *moral feeling* (kesadaran dan empati moral), serta *moral action* (perilaku bermoral). Ketiga aspek tersebut dapat berkembang secara optimal melalui perpaduan pendekatan yang menanamkan nilai secara langsung dan yang mendorong pertumbuhan nilai dari dalam diri individu. Pendidikan yang bermutu dan berkelanjutan bukan sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga berperan dalam membentuk kepribadian serta integritas moral peserta didik. Dalam proses ini, pendekatan menanamkan dan menumbuhkan nilai harus dipandang sebagai dua sisi dari satu mata uang. Keduanya saling melengkapi dalam membentuk peserta didik yang berpengetahuan luas, memiliki integritas moral, dan mampu menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Integrasi kedua pendekatan ini perlu dirancang secara sistematis dalam kurikulum, metode pengajaran, serta budaya sekolah agar pendidikan benar-benar menjadi proses pemanusiaan yang memerdekakan.

ANTI KORUPSI

Asian Development Bank (ADB) mendefinisikan korupsi sebagai tindakan yang mencerminkan perilaku menyimpang dan melanggar hukum, yang dilakukan oleh individu dalam sektor publik maupun swasta dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang-orang di sekitarnya. Menurut ADB, pelaku korupsi juga kerap mempengaruhi orang lain untuk melakukan tindakan serupa melalui penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan. Dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan mengenai pentingnya penanaman nilai-nilai anti korupsi dari dalam diri individu. Di sisi lain, upaya pencegahan korupsi dari luar diri didasarkan pada prinsip-prinsip utama, yaitu: 1) tanggung jawab, 2) keterbukaan, 3) keadilan, 4) kebijakan yang tepat, dan 5) pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan (Nanang & Romie, 2011:75).⁹

⁸ Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah,” T.T.

⁹ Chavit Ulya, “Peningkatan Kompetensi Literasi Antikorupsi Melalui Pelatihan Menulis Puisi,” 2018.

Akuntabilitas

Akuntabilitas dapat dipahami sebagai keselarasan antara ketentuan yang berlaku dengan pelaksanaan tugas di lapangan. Konsep ini berperan sebagai instrumen untuk mengontrol dan mengarahkan perilaku administratif, dengan cara mewajibkan adanya pertanggungjawaban kepada pihak eksternal yang memiliki otoritas terhadap kinerja suatu organisasi (Dubnik, 2005). Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yakni pemerintahan yang bersih, jujur, dan bermartabat (LAN & BPKP, 2003). Oleh karena itu, sangat penting untuk merancang dan menerapkan sistem pertanggungjawaban yang akurat, terukur, sah secara hukum, serta dapat diterima secara luas. Hal ini dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berlangsung secara efektif, efisien, bertanggung jawab, dan terbebas dari praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme.

Akuntabilitas publik sendiri memiliki berbagai bentuk mekanisme, seperti akuntabilitas terhadap program, proses, keuangan, hasil (outcome), aspek hukum, dan dimensi politik (Puslitbang, 2001). Dalam implementasinya, akuntabilitas harus dapat diukur secara jelas dan disertai dengan laporan serta pertanggungjawaban atas seluruh aktivitas yang dilakukan (Nanang & Romie, 2011:75). Penilaian atas kinerja administrasi meliputi pelaksanaan kegiatan, dampak yang ditimbulkan, serta manfaat yang dirasakan masyarakat baik dalam jangka pendek maupun panjang..¹⁰

Transparansi

Transparansi merupakan salah satu prinsip utama dalam upaya pemberantasan korupsi. Prinsip ini sangat penting karena langkah awal dalam melawan korupsi dimulai dengan keterbukaan. Seluruh proses pembuatan kebijakan harus dilaksanakan secara terbuka agar segala bentuk penyimpangan dapat dipantau oleh masyarakat (Eko Prasoj, 2007). Melalui transparansi, akan tercipta kepercayaan dua arah antara lembaga pendidikan seperti sekolah atau madrasah dengan masyarakat. Hal ini dilakukan dengan menyediakan informasi secara terbuka dan memastikan akses informasi yang mudah dan memadai. Penerapan transparansi secara konsisten akan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan tersebut. Ketika tingkat transparansi tinggi, maka kecurigaan publik terhadap lembaga tersebut pun akan menurun. Secara sederhana, transparansi dapat diartikan sebagai sikap terbuka, jujur, dan saling menghormati kepercayaan. Nilai-nilai ini akan membentuk karakter peserta didik agar

¹⁰ Tim Penulis Buku Pendidikan Anti-Korupsi, "Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi," Jakarta: Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI, 2011.

mereka mampu memikul tanggung jawab dengan baik, baik saat ini maupun di masa mendatang.

Kewajaran

Prinsip berikutnya dalam upaya anti korupsi adalah kewajaran, yang bertujuan untuk mencegah berbagai bentuk penyimpangan, khususnya dalam pengelolaan anggaran seperti mark-up dan praktik tidak wajar lainnya. Prinsip ini meliputi lima aspek utama, yaitu: 1) menyeluruh dan disiplin, 2) fleksibel, 3) dapat diprediksi, 4) jujur, dan 5) informatif (Nanang & Romie, 2011:82).

Aspek menyeluruh dan disiplin mengacu pada perlunya mempertimbangkan seluruh faktor yang relevan secara berkelanjutan, taat pada prinsip, serta menjaga pengeluaran agar tidak melebihi batas yang telah ditentukan. Fleksibilitas berkaitan dengan adanya ruang untuk pengambilan kebijakan tertentu demi mencapai efisiensi dan efektivitas. Sementara itu, prediktabilitas berarti perencanaan anggaran dilakukan secara jelas berdasarkan prinsip nilai guna dan biaya (value for money), sehingga dapat menghindari defisit dalam periode anggaran yang sedang berjalan. Kejujuran mencerminkan ketulusan dalam membuat estimasi penerimaan dan pengeluaran, tanpa manipulasi baik karena alasan teknis maupun politis. Ini merupakan elemen kunci dalam prinsip kewajaran. Terakhir, sifat informatif menjadi dasar untuk menilai kinerja, integritas, serta kualitas proses pengambilan keputusan (Nanang & Romie, 2011:82).

Kebijakan

Prinsip kebijakan dalam konteks anti korupsi berfungsi sebagai pedoman agar peserta didik dapat memahami serta menginternalisasi nilai-nilai antikorupsi. Kebijakan ini memiliki peran penting dalam mengatur pola hubungan sosial agar tidak terjadi pelanggaran yang bisa merugikan kepentingan negara maupun masyarakat. Kebijakan anti korupsi tidak selalu terbatas pada undang-undang khusus tentang korupsi, tetapi juga mencakup peraturan lain seperti undang-undang keterbukaan informasi publik, desentralisasi, anti monopoli, dan regulasi lain yang memungkinkan masyarakat melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan penggunaan anggaran publik (Nanang & Romie, 2011:83).

Unsur-unsur penting dalam kebijakan meliputi: 1) substansi kebijakan, 2) aktor yang merumuskan kebijakan, 3) pelaksana kebijakan, dan 4) budaya kebijakan itu sendiri. Efektivitas suatu kebijakan antikorupsi sangat dipengaruhi oleh sejauh mana substansi kebijakan tersebut menyentuh inti permasalahan korupsi, serta oleh kualitas moral dan

integritas dari pihak-pihak yang membuatnya. Keberhasilan kebijakan ini juga berkaitan erat dengan sejauh mana masyarakat memiliki pemahaman, nilai, sikap, serta kesadaran hukum terkait antikorupsi. Selain itu, budaya kebijakan yang berkembang akan menentukan sejauh mana masyarakat turut serta dalam pemberantasan korupsi.

Kontrol Kebijakan

Kontrol terhadap kebijakan merupakan upaya untuk memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar mampu diterapkan secara efektif dan berfungsi mencegah serta menghilangkan potensi korupsi. Berdasarkan pendapat Nanang & Romie (2011:83), terdapat tiga bentuk utama kontrol terhadap kebijakan, yaitu: 1) partisipasi, 2) revolusi, dan 3) reformasi.

Kontrol berbasis partisipasi dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam proses perumusan maupun pelaksanaan kebijakan, sehingga menciptakan pengawasan dari dalam. Bentuk lainnya adalah oposisi, yaitu dengan mengkritisi dan menawarkan alternatif kebijakan yang dinilai lebih tepat. Kontrol dalam bentuk revolusi dilakukan dengan menggantikan kebijakan yang sudah tidak sesuai atau bermasalah secara menyeluruh. Sementara itu, reformasi dilakukan dengan merevisi atau menyempurnakan kebijakan yang ada agar lebih relevan dan efektif di tengah perkembangan zaman.¹¹

Anti Korupsi Dalam Kitab Bilangan

Pemberontakan Korah, Datan dan Abiram (16:1-35).

Setiap pemberontakan besar selalu memiliki berbagai dimensi serta didorong oleh beragam alasan dan keluhan. Beberapa penafsir Alkitab berpendapat bahwa alur cerita ini terbentuk dari kombinasi tradisi-tradisi yang tercermin dalam dokumen J, E, dan P. Mereka menganggap kisah ini sebagai hasil penggabungan dari berbagai peristiwa pemberontakan yang pernah terjadi dalam sejarah Israel. Meskipun demikian, jika dilihat langsung dari teksnya, kita dapat mengenali bahwa pemberontakan ini memiliki aspek keagamaan sekaligus aspek sosial-politik.

Korah, yang berasal dari suku Lewi, mengajak rekan-rekannya sesama Lewi untuk menuntut jabatan keimaman (ayat 9–10). Di waktu yang sama, Datan dan Abiram dua orang dari suku Ruben menghadapkan tuntutan kepada Musa, karena mereka merasa Musa gagal

¹¹ Nida Amalia Dewi, "Pendidikan Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi Sebagai Upaya Preventif Pencegahan Korupsi," *Justices: Journal Of Law* 1, No. 1 (2022): 22–34.

memenuhi janji untuk membawa mereka ke tanah yang subur dan penuh hasil (ayat 14). Keputusan terhadap kehidupan yang terus-menerus di padang gurun membuat mereka memandang pemberontakan sebagai solusi yang masuk akal.

Datan dan Abiram menolak datang ke Kemah Suci untuk menemui Musa, melainkan mengirimkan pernyataan bernada keras sebagai bentuk penolakan (ayat 12–14). Sementara itu, Korah dan kelompoknya—sebanyak 250 orang pemimpin umat, sebagian besar dari mereka adalah orang Lewi (ayat 7, 8; 27:3)—membawa perbaraan sebagai simbol bahwa mereka merasa layak menjalankan tugas keimaman. Tiba-tiba, kemuliaan Tuhan hadir di pintu Kemah Suci, dan Tuhan menunjukkan dukungan-Nya kepada Musa dengan membuka tanah untuk menelan para pemimpin pemberontakan bersama keluarga dan harta milik mereka (ayat 32).

Penghakiman tidak berhenti di situ. Mereka yang mempersembahkan perbaraan juga dihukum dengan api. Namun, mengapa perbaraan yang digunakan oleh pemberontak disebut kudus? Sebab Tuhan mempunyai maksud yang suci bahkan terhadap perbaraan itu. "Karena perbaraan tersebut telah dibawa ke hadapan Tuhan oleh mereka maka benda itu menjadi tanda sebagai pengingat bagi umat Israel agar tidak ada orang luar yang bukan keturunan Harun yang mencoba mempersembahkan ukupan di hadapan Tuhan" (ayat 37–40). Peran Harun di tengah krisis itu menunjukkan secara dramatis fungsi imam sebagai perantara. Ia berdiri di antara yang hidup dan yang mati, bukan karena keunggulan pribadi (bandingkan Bilangan 16:5), tetapi karena ia adalah pilihan Tuhan. Melalui persembahannya, Harun membawa pendamaian dan menghentikan wabah, sebagaimana ditegaskan dalam Ibrani 5:4–6.

Rangkaian Peristiwa yang Membenarkan Imam Harun (16:36-17:13).

Di sini, Alkitab Ibrani memulai pasal yang baru. Para juru tulis Yahudi menganggap sisa pasal 16 dan 17 sebagai satu kesatuan yang membahas hak tunggal Harun sebagai imam. Perbaraan-perbaraan perunggu yang dipakai oleh para pemberontak dipukul sampai gepeng untuk dijadikan lempengan penutup mezbah sebagai tanda peringatan untuk mengabadikan imamat eksklusif rumah tangga Harun. Sisa-sisa dari pemberontakan itu muncul dalam gerutuan, yang menyebutkan bahwa Musa bersalah atas kematian para pemberontak. Murka Allah baru dipadamkan ketika Harun membawa perbaraannya untuk mengadakan pendamaian bagi umat itu (ay. 46). Puncak membenaran terhadap rumah tangga Harun terjadi dalam ujian dengan tongkat (ps. 17).

Dari dua belas tongkat pilihan, satu tongkat untuk setiap suku, terkecuali tongkat Lewi, yang terukir dengan nama Harun, secara adikodrati bersemi dan mengeluarkan buah badam di

hadapan Tuhan. Tongkat ini harus disimpan di dalam tabut sebagai kesaksian agar semua usaha untuk menolak keluarga pilihan Allah dapat dicegah.

Indikasi Anti Korupsi Dalam Kitab Bilangan

Dalam Kitab Bilangan, meskipun tidak secara eksplisit membahas "anti korupsi" seperti dalam konteks hukum modern, terdapat beberapa indikasi prinsip-prinsip anti korupsi yang tercermin melalui perintah Tuhan, keteladanan para pemimpin, serta hukuman bagi penyalahgunaan wewenang.

Berikut adalah beberapa indikasi anti korupsi dalam Kitab Bilangan:

1. Tanggung Jawab dan Transparansi Kepemimpinan

❖ Bilangan 16 – Pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram

- Mereka memberontak terhadap otoritas Musa dan Harun karena ambisi pribadi, bukan karena kehendak Tuhan.
- Pesan Anti Korupsi: Kepemimpinan rohani atau publik bukan untuk disalahgunakan demi kekuasaan atau keuntungan pribadi. Tuhan menolak pemimpin yang tidak memiliki integritas.¹²

2. Imparsialitas dalam Pelayanan dan Persembahan

❖ Bilangan 18:20–24 – Ketetapan untuk Suku Lewi

- Suku Lewi tidak menerima warisan tanah seperti suku lain, melainkan bagian dari persembahan umat.
- Pesan Anti Korupsi: Pelayanan kepada Tuhan bukan untuk mencari kekayaan pribadi. Ada sistem yang mencegah para pelayan Tuhan dari memperkaya diri secara tidak adil.

3. Penghitungan dan Pertanggungjawaban yang Akurat

❖ Bilangan 1, 2, dan 26 – Sensus Bangsa Israel

- Dilakukan secara teratur dan terperinci, menghitung setiap laki-laki dari usia tertentu.
- Pesan Anti Korupsi: Administrasi yang rapi dan akuntabel penting dalam mengelola umat dan sumber daya. Data tidak boleh dimanipulasi demi kepentingan pribadi.

4. Hukuman Tegas bagi Pelanggaran Amanah

¹² Yosefo Gule, "A Theological-Ethical Study Of Church Against Corruption," *Indonesian Journal Of Multidisciplinary Science* 2, No. 2 (2022): 1910–20.

❖ Bilangan 25 – Dosa di Peor (Penyembahan berhala dan perzinahan)

- Para pemimpin yang membiarkan umat menyimpang dihukum berat oleh Tuhan.
- Pesan Anti Korupsi: Ketika pemimpin membiarkan pelanggaran, termasuk kompromi dengan moral dan hukum Tuhan, akan ada konsekuensi serius.

Kitab Bilangan menunjukkan bahwa: Kepemimpinan adalah tanggung jawab, bukan hak istimewa, Penyalahgunaan wewenang mendapat hukuman dari Tuhan, Sistem administrasi dan keadilan harus dijalankan secara jujur, transparan, dan sesuai ketetapan Tuhan, Jika kamu ingin, saya bisa bantu merangkumnya dalam bentuk bahan presentasi, renungan, atau esai pendek untuk digunakan dalam diskusi kelompok atau ibadah.¹³

Implementasi Pendidikan Menanamkan Dan Menumbuhkan Karakter Anti Korupsi Menurut Kitab Bilangan

Implementasi pendidikan karakter anti-korupsi berdasarkan Kitab Bilangan membutuhkan pendekatan yang menghubungkan nilai-nilai moral dalam kitab tersebut dengan konteks pendidikan modern. Kitab Bilangan sendiri tidak secara eksplisit membahas "anti-korupsi" dalam terminologi modern, tetapi mengandung banyak kisah dan prinsip yang dapat diinterpretasi sebagai landasan untuk membangun karakter yang menolak korupsi. Berikut beberapa implementasi yang mungkin:¹⁴

1. Kepemimpinan yang Adil dan Transparan (Bilangan 11:16-17, 11:24-30):

- Prinsip: Kisah pemilihan pemimpin dan pembagian tugas dalam perjalanan bangsa Israel mengajarkan pentingnya kepemimpinan yang adil, transparan, dan akuntabel. Allah memilih pemimpin berdasarkan kemampuan dan hikmat, bukan karena koneksi atau keuntungan pribadi. Pembagian tugas yang merata mencegah konsentrasi kekuasaan yang dapat memicu korupsi.
- Implementasi Pendidikan: Gunakan kisah ini untuk mendiskusikan pentingnya kepemimpinan yang bertanggung jawab, transparansi dalam pengambilan keputusan, dan mekanisme pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Ajarkan siswa untuk memahami pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam distribusi sumber

¹³ Mark Pyman Dkk., *Corruption As A Threat To Stability And Peace* (Transparency International Deutschland Ev, 2014).

¹⁴ Tresa Marbun, "Kepemimpinan Musa Dalam Kitab Bilangan Dan Implikasinya Bagi Guru Pak," *Sepakat: Jurnal Pastoral Kateketik* 9, No. 1 (2023): 38–47.

daya. Latihan kepemimpinan yang melibatkan tanggung jawab dan akuntabilitas dapat diterapkan.

2. Kejujuran dan Integritas (Bilangan 14:24, 32:11-12):

- Prinsip: Kisah pengintaian tanah Kanaan dan pembagian tanah menunjukkan pentingnya kejujuran dan integritas dalam melaporkan fakta dan mengambil keputusan. Ketidakjujuran para pengintai menyebabkan bangsa Israel kehilangan kesempatan untuk memasuki tanah perjanjian. Pembagian tanah yang adil dan transparan juga mencegah konflik dan ketidakpuasan.
- Implementasi Pendidikan: Gunakan kisah ini untuk mendiskusikan bahaya penyimpangan fakta, pentingnya kejujuran dalam berbagai situasi, dan konsekuensi dari ketidakjujuran. Ajarkan siswa untuk berani mengatakan kebenaran, bahkan jika itu sulit, dan untuk menolak tekanan untuk berbuat curang atau korup. Simulasi situasi yang menuntut kejujuran dapat menjadi latihan yang efektif.

3. Kedisiplinan dan Kepatuhan (Bilangan 5:1-4, 15:32-36):

- Prinsip: Hukum-hukum dan peraturan yang diberikan kepada bangsa Israel menekankan pentingnya kedisiplinan dan kepatuhan pada aturan. Konsekuensi yang diberikan kepada mereka yang melanggar aturan menunjukkan betapa pentingnya mentaati hukum dan peraturan.
- Implementasi Pendidikan: Gunakan kisah ini untuk menjelaskan pentingnya aturan dan peraturan dalam masyarakat, dan bagaimana kepatuhan pada aturan dapat mencegah korupsi. Ajarkan siswa untuk memahami pentingnya disiplin diri dan tanggung jawab pribadi. Diskusi tentang konsekuensi pelanggaran aturan dan pentingnya hukum dapat dilakukan.¹⁵

4. Keadilan dan Rasa Keadilan (Bilangan 35:9-34):

- Prinsip: Hukum tentang pembunuhan dan perlindungan hak-hak manusia menunjukkan pentingnya keadilan dan rasa keadilan dalam masyarakat.
- Implementasi Pendidikan: Gunakan kisah ini untuk mendiskusikan pentingnya keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan bagaimana sistem hukum yang adil dapat mencegah korupsi. Ajarkan siswa untuk memahami pentingnya memperlakukan semua orang secara adil dan setara, tanpa memandang status sosial atau kekayaan.

¹⁵ Steven Tubagus, "Makna Kepemimpinan Daud Dalam Perjanjian Lama," *Kinaa: Jurnal Kepemimpinan Kristen Dan Pemberdayaan Jemaat* 1, No. 1 (2020): 56–67.

5. Pengelolaan Sumber Daya (Bilangan 31:25-47):

- Prinsip: Pembagian rampasan perang menunjukkan pentingnya pengelolaan sumber daya yang adil dan transparan.

KESIMPULAN

Implementasi pendidikan karakter anti-korupsi berdasarkan kitab bilangan dalam alkitab. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-teologis melalui metode studi pustaka, dengan menganalisis narasi dan pesan-pesan etis dalam Kitab Bilangan, termasuk kisah pemberontakan Korah dan ketidaktaatan bangsa Israel. Hasil dari analisis tersebut mengungkapkan bahwa Kitab Bilangan memuat nilai-nilai fundamental yang mendukung pembentukan karakter antikorupsi, antara lain kejujuran, rasa tanggung jawab, keteladanan dalam kepemimpinan, serta penggambaran konsekuensi nyata atas tindakan penyimpangan moral.

Penelitian ini merekomendasikan integrasi nilai-nilai etis dari kitab suci ke dalam kurikulum pendidikan karakter sebagai upaya membentuk masyarakat yang adil dan bebas dari praktik korupsi. Selain itu, studi ini turut mengulas berbagai definisi karakter dan pendidikan karakter dari pandangan para ahli, serta menekankan prinsip-prinsip antikorupsi seperti akuntabilitas, transparansi, kewajaran, pembuatan kebijakan, dan pengawasan kebijakan. Lebih jauh, Kitab Bilangan ditafsirkan sebagai sumber nilai antikorupsi, yang tercermin melalui kepemimpinan yang bertanggung jawab dan terbuka, prinsip imparialitas dalam pelayanan publik, praktik penghitungan yang teliti, serta hukuman tegas terhadap penyalahgunaan kepercayaan. Penerapan nilai-nilai karakter anti-korupsi berdasarkan Kitab Bilangan disarankan dilakukan dengan mengaitkan prinsip-prinsip moral dalam teks Alkitab dengan tantangan dan kebutuhan pendidikan masa kini. Beberapa contoh implementasi yang dapat diterapkan antara lain: kepemimpinan yang adil dan transparan, kejujuran dan integritas, kedisiplinan dan ketaatan, penerapan keadilan, serta pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Anti-Korupsi, Tim Penulis Buku Pendidikan. "Pendidikan Anti-Korupsi untuk Perguruan Tinggi." *Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI*, 2011.
- Carmignola, Matteo, dan BAB Rel. "Participatory Revelation," t.t.

- Dewi, Nida Amalia. "Pendidikan Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi Sebagai Upaya Preventif Pencegahan Korupsi." *JUSTICES: Journal of Law* 1, no. 1 (2022): 22–34.
- Gule, Yosefo. "A Theological-Ethical Study of Church Against Corruption." *Indonesian Journal of Multidisciplinary Science* 2, no. 2 (2022): 1910–20.
- INDONESIA, MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK. "PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH," t.t.
- Keil, Carl Friedrich, dan Franz Delitzsch. *Biblical Commentary on the Old Testament: Isaiah*. Vol. 26. T. and T. Clark, 1892.
- Lickona, Thomas. *Educating for character: How our schools can teach respect and responsibility*. Bantam, 1992.
- Marbun, Tresa. "Kepemimpinan Musa dalam Kitab Bilangan dan Implikasinya Bagi Guru PAK." *Sepakat: Jurnal Pastoral Kateketik* 9, no. 1 (2023): 38–47.
- Pyman, Mark, Tobias Bock, Eléonore Vidal de la Blanche, Saad Mustafa, dan Dominik Zaum. *Corruption as a threat to stability and peace*. Transparency International Deutschland eV, 2014.
- Salahudin, Anas, dan Irwanto Alkrienciehie. *Pendidikan karakter: pendidikan berbasis agama & budaya bangsa*. Pustaka Setia, 2013.
- Samani, DR Muchlas. "Konsep dan model pendidikan karakter," 2019.
- Sudrajat, Ajat. "Mengapa Pendidikan Karakter" 1, no. 1 (2011): 47–58. <https://doi.org/10.21831/jpk.v1i1.1316>.
- Taylor, Donald James. "A Narrative Critical Analysis of Korah's Rebellion in Numbers 16 and 17," 2010.
- Tilaar, Henry Alexis Rudolf. *Perubahan sosial dan pendidikan: Pengantar pedagogik transformatif untuk Indonesia*. Penerbit PT. Gramedia Widiasarana Indonesia bekerja sama dengan Center for ..., 2002.
- Tubagus, Steven. "Makna Kepemimpinan Daud Dalam Perjanjian Lama." *KINAA: Jurnal Kepemimpinan Kristen Dan Pemberdayaan Jemaat* 1, no. 1 (2020): 56–67.
- Ulya, Chavit. "Peningkatan Kompetensi Literasi Antikorupsi Melalui Pelatihan Menulis Puisi," 2018.
- Wibowo, Agus. "Manajemen pendidikan karakter di sekolah," 2017.
- Zubaedi, M Ag. *Desain Pendidikan Karakter*. Prenada Media, 2015.
- Baswedan, A. (2015). Pidato dalam Peringatan Hari Guru Nasional. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Budiningsih, C. A. (2004). Belajar dan Pembelajaran. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lickona, T. (1991). *Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*. New York: Bantam Books.

- Tilaar, H. A. R. (2015). Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Konteks Globalisasi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2012). Pendidikan Anti Korupsi untuk Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat.
- Lickona, T. (1991). Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility. New York: Bantam Books.
- Tilaar, H. A. R. (2015). Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Konteks Globalisasi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Budiningsih, C. A. (2004). Belajar dan Pembelajaran. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suyanto, B. (2010). Masalah Sosial Anak dan Remaja. Jakarta: Prenada Media.
- Wibowo, A. (2013). Pendidikan Karakter: Strategi Membangun Karakter Bangsa Berperadaban. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.